

**DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Uraian Ringkas Temuan	Tindakanlanjut Temuan
Aspek Pengelolaan Keuangan :		
1.	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium Narasumber yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara senilai Rp. 425.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/235/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada PPTK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium narasumber. 2. Sudah disetorkan ke KASDA sebesar Rp. 425.000,- tanggal 22 April 2024.
2.	Pembayaran komponen biaya perjalanan dinas berupa transport taksi bandara belum secara riil (at cost) sejumlah 5.006.0000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/235/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan taksi bandara yang tidak dilampiri bukti pembayaran secara riil (at cost). 2. Sudah disetorkan ke KASDA oleh masing-masing ASN dengan total pengembalian sebesar Rp. 5.006.000,-
3.	Pelaksanaan Perjalanan dinas Tidak Wajar sejumlah Rp.199.361.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/237/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada PPK Badan Kesbangpol Prov. Kalteng agar lebih cermat dalam meneliti / memverifikasi bukti perjalanan dinas. 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/238/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada PPTK Badan Kesbangpol Prov. Kalteng untuk melengkapi bukti dukung berupa data tentang nama, alamat dan kontak person keluarga / warga masyarakat tempat menginap pada saat melakukan perjalanan dinas. 3. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/239/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam melakukan pembayaran belanja perjalanan dinas.
4.	Terdapat Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi sejumlah Rp49.277.500,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/240/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada PPTK Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk mempertanggungjawabkan honorarium tim dan tim sekretariat pelaksana yang tidak diperkenankan karena merupakan tugas pokok dan fungsi sejumlah Rp. 49.277.500,- dengan menyetorkan ke KASDA. 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/241/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Bidang Perencanaan untuk lebih cermat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyusun penganggaran honorarium. 3. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/242/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Kabid Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik supaya lebih cermat dalam Menyusun tim pelaksana kegiatan dan dalam pengusulan penganggaran honorarium. 4. Sudah disetorkan ke KASDA oleh masing-masing nama yang tercantum dalam lampiran penerima honorarium.

5.	Terdapat bukti pembayaran upah jasa sopir dan biaya BBM kegiatan pemusatan diklat paskibraka yang tidak sah senilai Rp16.800.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/243/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Diklat Paskibaraka untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 16.800.000,- 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/244/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Teguran Tertulis yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Diklat Paskibaraka untuk mempertanggungjawabkan belanja tidak disertai bukti pengeluaran yang sah dan tidak sesuai jumlah pengeluaran yang sebenarnya. 3. Sudah disetorkan ke KASDA tanggal 24 Juli 2024.
6.	Penatausahaan pendapatan daerah oleh Bendahara Penerimaan tidak tertib mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sejumlah Rp. 1.000.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/245/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Bendahara Penerimaan Badan Kesbang dan Politik TA 2023 supaya menyetorkan pendapatan daerah atas sewa Gedung aula Bakesbangpol yang telah diterima ke KASDA sebesar Rp. 1.000.000,- 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/246/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Bendahara Penerimaan Badan Kesbang dan Politik TA 2023 atas kelalaian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menatausahakan pendapatan daerah yang diterima.. 3. Sudah disetorkan ke KASDA tanggal 22 Nopember 2023.
7.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Hibah kepada POLDA Kalimantan Tengah dan KOREM 102/Panju Panjung belum sesuai ketentuan yang berlaku	Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/269/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Bidang dan PPTK Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik agar dalam menganggarkan, melaksanakan dan merealisasikan bantuan hibah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
8.	Penatausahaan Panjar belum tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/247/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Teguran Tertulis yang ditujukan kepada PPTK (4 orang) agar lebih cermat dalam Menyusun dan mengajukan NPD Panjar. 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/248/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 kepada Seluruh PPTK agar lebih cermat dalam menghitung panjar dan menyusun NPD Panjar. 3. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/249/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam meneliti dokumen pengajuan NPD Panjar.
9.	Pengelolaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) belum tertib	Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/270/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditujukan kepada PPTK Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng agar pengaturan BBM dibuat dengan surat keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemberian belanja BBM.
10.	Penganggaran dan pembayaran honorarium PPTK tidak sesuai standar harga satuan	Surat Keterangan Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/271/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang pembayaran honorarium TA 2024 masih dianggarkan sama seperti tahun sebelumnya karena pagu anggaran tidak mencukupi bila dibayarkan sesuai standar harga satuan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Aspek Tugas Pokok dan Fungsi :		
11.	Penetapan PPTK belum sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/252/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang menyatakan bahwa penetapan PPTK TA 2024 akan mengangkat ASN yang menduduki jabatan structural satu tingkat di bawah Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku. 2. SK PPTK Tahun Anggaran 2024

12.	Uraian Tugas Jabatan Pelaksana belum ditetapkan dengan surat Keputusan	Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 800/02.A/Set.1/Kesbangpol/II/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng.
Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia :		
13.	Terdapat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/250/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal teguran tertulis yang ditujukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian karena belum melaksanakan tugasnya dalam Menyusun usulan Pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.. 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/251/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk membuat usulan pejabat yang akan mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pejabat fungsional. 3. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/253/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 ditujukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk berkoordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yaitu LAN. 4. Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di LAN JAKARTA.
Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana :		
14.	Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib dan optimal	<ol style="list-style-type: none"> 5. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 701/254/Set.2/Kesbangpol/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Pengguna Barang untuk memasang dan memperbaharui KIR, memasang kodefikasi barang, melakukan inventaris barang milik daerah dan membuat kartu pemeliharaan / perawatan. 6. Lampiran Kartu Pemeliharaan Barang, fhoto kodefikasi barang dan pemasangan KIR.

Palangka Raya, 29 April 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



Dr. M. KATMA F. DIRUN, SE., MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661022 199308 1 001